

## DINAMIKA RELASI KUASA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS: STUDI KASUS SATGAS PPKS UNDANA

Jordan A. M. Solukh<sup>1</sup>, Susana C. L. Pellu<sup>2</sup>, Jeny M. Ataupah<sup>3</sup>  
[jordansolukh5@gmail.com](mailto:jordansolukh5@gmail.com)<sup>1</sup>, [susana.c.l.pellu@staf.undana.ac.id](mailto:susana.c.l.pellu@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>,  
[jeni.ataupah@staf.undana.ac.id](mailto:jeni.ataupah@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Nusa Cendana

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Nusa Cendana melalui peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi Ketua dan anggota Satgas PPKS, ahli psikologi, mahasiswa, serta penyintas. Analisis data menggunakan perspektif relasi kuasa Michel Foucault untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam struktur institusi, relasi sosial, dan wacana yang memengaruhi praktik pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNDANA telah melakukan upaya pencegahan melalui pembentukan regulasi internal, pelaksanaan edukasi, dan sosialisasi kepada sivitas akademika. Sementara itu, penanganan dilakukan melalui mekanisme pelaporan, pemeriksaan, rekomendasi, serta pendampingan korban secara berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan berupa ketimpangan relasi kuasa, budaya diam, stigma terhadap korban, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pembangunan budaya kampus yang aman, inklusif, dan berpihak pada korban secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Satgas PPKS, Relasi Kuasa, Pencegahan Dan Penanganan.

### ABSTRACT

*This study aims to describe and analyze the dynamics of the prevention and handling of sexual violence at Nusa Cendana University through the role of the Sexual Violence Prevention and Handling Task Force (Satgas PPKS). This research employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving purposively selected informants, including the Head and members of the Satgas PPKS, a psychology expert, students, and a survivor. The data analysis is grounded in Michel Foucault's theory of power relations to examine how power operates within institutional structures, social relations, and discursive practices that influence the prevention and handling of sexual violence in the university setting. The findings reveal that UNDANA has implemented preventive measures through the establishment of internal regulations, educational programs, and awareness campaigns targeting the academic community. Meanwhile, case handling is conducted through systematic procedures, including reporting, investigation, recommendation, and continuous victim assistance. However, the implementation process still faces significant challenges, such as unequal power relations, a culture of silence, victim stigmatization, and limited institutional resources. Therefore, strengthening institutional capacity and fostering a safe, inclusive, and victim-centered campus culture are essential for improving the effectiveness of sexual violence prevention and response in higher education.*

**Keywords:** Sexual Violence, Higher Education, PPKS Task Force, Power Relations, Prevention And Response.

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan tindakan individual, tetapi juga berkelindan erat dengan struktur sosial, budaya, serta relasi kuasa yang mengakar dalam institusi pendidikan tinggi. Perguruan tinggi sebagai ruang intelektual idealnya menjadi tempat yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun, realitas menunjukkan bahwa kampus justru menjadi salah satu ruang di mana kekerasan seksual masih sering terjadi, baik dalam bentuk yang tampak maupun yang terselubung dalam praktik-praktik sosial dan institusional. Kekerasan seksual di kampus mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari pelecehan verbal, nonverbal, hingga kekerasan fisik dan struktural yang merugikan integritas korban secara menyeluruh. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, gangguan emosional, serta hambatan dalam proses akademik dan sosial korban (Saputra dkk., 2024; Zaki, 2020). Dalam banyak kasus, kekerasan seksual di kampus juga berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, di mana pelaku seringkali memiliki posisi struktural yang lebih tinggi, seperti dosen, staf, atau pihak yang memiliki otoritas dalam organisasi kampus (Manuel & Purba, 2023).

Fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas yang mencakup budaya patriarki, normalisasi kekerasan, serta praktik institusional yang secara tidak langsung mendukung keberlangsungan tindakan tersebut. Berbagai studi menunjukkan bahwa kekerasan seksual sering kali terjadi dalam konteks relasi sosial yang timpang, di mana korban berada dalam posisi subordinat yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi (Asy'ari, 2022; Saputra dkk., 2024). Selain itu, kekerasan seksual juga sering kali dilegitimasi melalui wacana-wacana tertentu yang menormalisasi tindakan tersebut, baik melalui budaya kampus, norma sosial, maupun praktik institusional yang mengabaikan atau bahkan menutup-nutupi kasus yang terjadi (Manuel & Purba, 2023; Zaki, 2020). Dalam konteks ini, kekerasan seksual tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga merupakan manifestasi dari struktur kekuasaan yang bekerja secara sistemik dalam institusi pendidikan.

Untuk memahami dinamika kekerasan seksual di perguruan tinggi secara lebih mendalam, pendekatan teoretis yang relevan adalah teori relasi kuasa yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Foucault memandang kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan sebagai jaringan relasi yang tersebar dalam berbagai praktik sosial dan institusional. Kekuasaan bekerja melalui mekanisme disiplin, pengawasan, dan normalisasi yang membentuk perilaku individu sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (Pratama, 2021; Purwanti, 2020). Dalam konteks kampus, mekanisme ini dapat dilihat melalui berbagai aturan, prosedur, serta praktik akademik yang mengatur perilaku civitas akademika, termasuk dalam hal relasi antara dosen dan mahasiswa. Konsep panoptikon yang diperkenalkan oleh Foucault menggambarkan bagaimana pengawasan yang terus-menerus dapat membuat individu menginternalisasi norma-norma tertentu dan mengontrol perilaku mereka sendiri (Kartono dkk., 2023).

Lebih lanjut, Foucault juga menekankan hubungan erat antara kekuasaan dan pengetahuan (*power/knowledge*), di mana pengetahuan tidak bersifat netral, melainkan diproduksi dalam konteks relasi kekuasaan tertentu. Dalam konteks kekerasan seksual di kampus, wacana yang berkembang mengenai korban, pelaku, dan institusi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan tertentu yang berkaitan dengan kekuasaan (Alfiansyah & Saparudin, 2023; Pradana dkk., 2022). Misalnya, dalam beberapa kasus, institusi pendidikan cenderung melindungi reputasi mereka dengan menutupi atau meminimalisasi kasus

kekerasan seksual, sehingga korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Wacana ini kemudian membentuk persepsi publik mengenai kekerasan seksual dan mempengaruhi bagaimana kasus tersebut ditangani. Oleh karena itu, analisis berbasis teori relasi kuasa menjadi penting untuk mengungkap bagaimana kekuasaan bekerja dalam praktik pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

Dalam upaya mengatasi permasalahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melalui Permendikbud terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), yang mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas PPKS. Satgas ini memiliki peran strategis dalam merancang dan mengimplementasikan program pencegahan, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, serta memberikan pendampingan kepada korban (Pradana dkk., 2022; Sari & Syas, 2023). Keberadaan Satgas PPKS diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran civitas akademika, serta resistensi terhadap perubahan budaya institusional.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan kekerasan seksual di kampus adalah adanya budaya diam (*silence culture*) dan stigma terhadap korban, yang menghambat proses pelaporan dan penanganan kasus. Banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang mereka alami karena takut akan stigma sosial, pembalasan dari pelaku, atau ketidakpercayaan terhadap sistem penanganan yang ada (Saputra dkk., 2024; Zaki, 2020). Budaya diam ini diperkuat oleh relasi kuasa yang timpang, di mana korban sering kali berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, praktik institusional yang kurang transparan dan akuntabel juga turut memperparah situasi ini, sehingga kekerasan seksual menjadi fenomena yang tersembunyi dan sulit diungkap.

Di sisi lain, berbagai model dan strategi pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di kampus telah dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ini. Pendekatan berbasis institusi menekankan pentingnya integrasi kebijakan, pelibatan seluruh civitas akademika, serta penyediaan layanan yang komprehensif bagi korban, termasuk pendampingan psikologis dan hukum (Pradana dkk., 2022; Sari & Syas, 2023). Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas program pencegahan juga menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif dalam mengurangi kasus kekerasan seksual di kampus. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen institusi serta kemampuan untuk mengatasi hambatan struktural dan budaya yang ada.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, khususnya dalam konteks analisis relasi kuasa dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tingkat institusi. Sebagian besar studi cenderung berfokus pada aspek normatif atau deskriptif mengenai kebijakan dan fenomena kekerasan seksual, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana kekuasaan bekerja dalam praktik tersebut. Selain itu, studi yang secara spesifik mengkaji peran Satgas PPKS dalam perspektif teori Foucault masih relatif terbatas, terutama dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia bagian timur, seperti Universitas Nusa Cendana. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengintegrasikan analisis relasi kuasa dengan studi empiris mengenai implementasi kebijakan PPKS di tingkat institusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Nusa Cendana melalui studi

kasus pada Satgas PPKS, dengan menggunakan perspektif relasi kuasa Michel Foucault. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kekuasaan bekerja dalam struktur institusi, relasi sosial, serta wacana yang mempengaruhi terjadinya dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah dinamika relasi kuasa dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Nusa Cendana melalui peran Satgas PPKS? Rumusan masalah ini menjadi fokus utama dalam penelitian untuk mengungkap secara kritis bagaimana relasi kuasa mempengaruhi kebijakan, praktik, serta pengalaman korban dalam konteks kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika relasi kuasa dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, khususnya melalui studi kasus pada Satuan Tugas PPKS Universitas Nusa Cendana. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara kontekstual dan interpretatif, terutama dalam mengkaji bagaimana kekuasaan bekerja dalam praktik institusional, relasi sosial, dan konstruksi wacana di lingkungan kampus. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, dengan informan yang terdiri dari Ketua dan anggota Satgas PPKS, ahli psikologi, serta perwakilan mahasiswa yang memiliki pengalaman atau pemahaman terkait isu kekerasan seksual. Pemilihan informan ini didasarkan pada relevansi peran dan akses terhadap informasi yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (human instrument) yang didukung oleh pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan dokumentasi. Pedoman wawancara dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, serta pemahaman informan mengenai kebijakan dan praktik penanganan kekerasan seksual serta dinamika relasi kuasa yang terjadi. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan, laporan, serta arsip resmi Satgas PPKS. Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif sekaligus meningkatkan validitas melalui triangulasi metode.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diseleksi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengacu pada perspektif relasi kuasa Michel Foucault, khususnya konsep disiplin, wacana, dan normalisasi dalam institusi pendidikan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu, serta teknik member check kepada informan untuk memastikan akurasi dan konsistensi temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini berlokasi di Universitas Nusa Cendana (UNDANA), sebuah institusi pendidikan tinggi negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang secara historis berdiri sejak tahun 1962. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama diarahkan pada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagai perangkat

kelembagaan yang memiliki mandat formal dalam menangani isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Satgas PPKS UNDANA dibentuk melalui Keputusan Rektor Nomor 1303/PK/2022 dan diperkuat oleh Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 yang menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Secara organisatoris, Satgas PPKS UNDANA memiliki struktur yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, serta beberapa divisi operasional, antara lain divisi pencegahan, divisi pelaporan dan penindakan, serta divisi pemulihan korban. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian kerja yang spesifik dan terlembagakan dalam menangani isu kekerasan seksual. Selain itu, secara kelembagaan Satgas berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), yang mengindikasikan bahwa isu kekerasan seksual tidak hanya diposisikan sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari agenda akademik dan sosial institusi.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari lima kategori utama yang merepresentasikan posisi strategis dalam struktur sosial kampus, yaitu Ketua Satgas (SA), anggota Satgas (RP), ahli psikologi (MT), mahasiswa (DN), serta penyintas (AN). Variasi posisi ini menghadirkan spektrum data yang mencerminkan pengalaman institusional, profesional, hingga pengalaman personal dalam konteks kekerasan seksual di kampus. Data yang diperoleh menunjukkan adanya keterkaitan antara posisi sosial informan dengan akses terhadap informasi, pengalaman, serta keterlibatan dalam proses penanganan kasus.

#### 1. Arsitektur Pencegahan: Regulasi, Edukasi, dan Produksi Kesadaran Kolektif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pencegahan kekerasan seksual di UNDANA tidak bersifat tunggal, melainkan dibangun melalui arsitektur kebijakan dan praktik yang berlapis. Pada level struktural, pencegahan dilembagakan melalui regulasi internal yang mengatur secara komprehensif tentang mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Regulasi ini berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan tindakan institusional sekaligus menjadi acuan operasional bagi Satgas PPKS.

Ketua Satgas (SA) mengungkapkan:

“Semua kegiatan pencegahan yang kami lakukan sudah mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh kampus dan kementerian.”

Selain aspek regulatif, pencegahan juga dioperasionalkan melalui praktik edukasi yang ditujukan kepada seluruh sivitas akademika. Edukasi ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti seminar, pelatihan, dan kegiatan sosialisasi yang membahas isu kekerasan seksual, kesetaraan gender, serta kesehatan reproduksi. Kegiatan ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam membangun kesadaran kolektif di lingkungan kampus.

Anggota Satgas (RP) menyatakan:

“Kami melakukan sosialisasi ke berbagai fakultas, terutama kepada mahasiswa baru agar mereka memahami isu kekerasan seksual sejak awal.”

Lebih lanjut, pencegahan juga dilakukan melalui strategi penguatan budaya kampus, seperti kampanye anti kekerasan seksual, penyediaan media informasi, serta pelibatan organisasi mahasiswa. Praktik ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas formal, tetapi juga sebagai proses kultural yang berupaya membentuk norma dan nilai di lingkungan kampus.

#### 2. Proseduralitas Penanganan: Mekanisme Berlapis dan Orientasi pada Korban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual di UNDANA dilaksanakan melalui mekanisme yang bersifat prosedural, berlapis, dan terstruktur. Tahapan penanganan dimulai dari penerimaan laporan yang dapat dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk media elektronik dan layanan langsung. Fleksibilitas kanal pelaporan ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan aksesibilitas bagi korban.

Anggota Satgas (RP) menjelaskan:

“Laporan bisa masuk melalui berbagai cara, kemudian kami lakukan pemeriksaan awal untuk memastikan kronologi kejadian.”

Setelah laporan diterima, Satgas melakukan pemeriksaan yang bersifat tertutup dengan durasi maksimal 30 hari kerja. Proses ini melibatkan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak yang terkait dengan kasus. Hasil pemeriksaan kemudian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada pimpinan kampus.

Ketua Satgas (SA) menyatakan:

“Kami menyusun rekomendasi yang berisi sanksi bagi pelaku dan langkah pemulihan bagi korban.”

Dalam konteks penanganan korban, layanan yang diberikan mencakup pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta dukungan sosial. Pendampingan ini tidak bersifat insidental, melainkan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan korban.

Ahli psikologi (MT) menyatakan:

“Korban membutuhkan pendampingan jangka panjang karena dampak psikologis yang dialami tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.”

### 3. Resistensi Sosial dan Hambatan Struktural dalam Praktik Penanganan

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik yang bersifat sosial maupun struktural. Salah satu hambatan utama adalah keberadaan stigma terhadap korban yang berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan kasus.

Mahasiswa (DN) menyatakan:

“Korban sering kali takut melapor karena khawatir akan stigma dari lingkungan sekitar.”

Selain itu, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses pelaporan. Dalam beberapa kasus, posisi sosial pelaku yang lebih tinggi menciptakan tekanan psikologis bagi korban.

Penyintas (AN) mengungkapkan:

“Saya sempat merasa takut karena pelaku memiliki posisi yang cukup kuat di kampus.”

Hambatan lain yang teridentifikasi adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah personel maupun fasilitas pendukung. Kondisi ini mempengaruhi kapasitas Satgas dalam menjalankan fungsi secara optimal, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

### 4. Konstelasi Relasi Kuasa dalam Praktik Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkan adanya konstelasi relasi kuasa yang bekerja dalam praktik pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Relasi ini tidak hanya muncul dalam interaksi antara korban dan pelaku, tetapi juga dalam hubungan antara Satgas dengan institusi serta pihak-pihak lain yang terlibat.

Ketua Satgas (SA) menyatakan:

“Dalam beberapa situasi, ada tekanan dari pihak tertentu, tetapi kami tetap berusaha menjalankan tugas secara independen.”

Relasi kuasa ini juga terlihat dalam proses pengambilan keputusan serta dalam bagaimana kasus diproses di tingkat institusi. Selain itu, dinamika ini turut mempengaruhi bagaimana isu kekerasan seksual dibicarakan dan diposisikan dalam ruang publik kampus.

Tabel 1. Matriks Sintesis Temuan Penelitian

Dimensi Analisis	Temuan Empiris
Struktur Institusi	Satgas PPKS memiliki struktur formal dan legitimasi regulatif
Pencegahan	Dilaksanakan melalui regulasi, edukasi, dan pembentukan budaya kampus
Penanganan	Prosedural, berlapis, dan berorientasi pada korban
Hambatan	Stigma sosial, ketimpangan kuasa, keterbatasan sumber daya
Relasi Kuasa	Mempengaruhi pelaporan, proses penanganan, dan dinamika institusi

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNDANA telah terlembagakan secara formal dan dijalankan melalui mekanisme yang sistematis. Namun, dalam praktiknya, terdapat dinamika sosial dan kelembagaan yang turut membentuk jalannya proses tersebut .

### Pembahasan

#### 1. Relasi Kuasa sebagai Struktur Dasar dalam Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak dapat dipahami semata sebagai tindakan individual, melainkan sebagai fenomena yang berakar pada relasi kuasa yang timpang dalam struktur institusi. Hal ini sejalan dengan pandangan Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak bersifat terpusat, melainkan tersebar dalam jaringan relasi sosial yang bekerja melalui berbagai mekanisme institusional dan praktik keseharian (Alfiansyah & Saparudin, 2023; Pratama, 2021). Dalam konteks UNDANA, relasi kuasa terlihat jelas dalam hubungan antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, di mana posisi struktural tertentu memberikan legitimasi simbolik yang dapat dimanfaatkan untuk mendominasi pihak lain.

Ketimpangan ini juga diperkuat oleh temuan empiris terkait ketakutan korban untuk melapor, terutama ketika pelaku memiliki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki kampus. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kuasa bekerja tidak hanya melalui tindakan langsung, tetapi juga melalui efek psikologis yang membentuk perilaku individu, termasuk dalam hal membungkam korban. Hal ini konsisten dengan temuan Saputra dkk., (2024) yang menyatakan bahwa ketimpangan relasi kuasa menjadi faktor utama dalam terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan demikian, kekerasan seksual dapat dipahami sebagai produk dari struktur relasi kuasa yang tidak seimbang dan terus direproduksi dalam praktik institusional.

#### 2. Disiplin, Pengawasan, dan Normalisasi dalam Lingkungan Kampus

Dalam perspektif Foucauldian, kekuasaan bekerja melalui mekanisme disiplin dan pengawasan yang membentuk perilaku individu agar sesuai dengan norma yang berlaku (Purwanti, 2020). Temuan penelitian menunjukkan bahwa UNDANA telah mengembangkan berbagai mekanisme disipliner melalui regulasi, prosedur, serta struktur kelembagaan seperti Satgas PPKS. Namun, mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen yang membentuk perilaku sivitas akademika secara keseluruhan.

Konsep panoptikon yang diperkenalkan oleh Foucault dapat digunakan untuk memahami bagaimana pengawasan bekerja dalam konteks ini. Meskipun tidak selalu bersifat langsung, keberadaan regulasi dan Satgas PPKS menciptakan kesadaran akan kemungkinan pengawasan yang membuat individu menyesuaikan perilaku mereka (Kartono dkk., 2023). Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah kekerasan seksual, terutama karena masih adanya budaya diam dan stigma terhadap korban.

Selain itu, normalisasi juga terlihat dalam bagaimana kekerasan seksual dipersepsikan dan ditangani di lingkungan kampus. Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan untuk

meminimalisasi atau menormalisasi tindakan tertentu melalui wacana institusional. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin dan normalisasi tidak selalu menghasilkan perlindungan bagi korban, tetapi juga dapat berfungsi sebagai mekanisme yang mempertahankan struktur kekuasaan yang ada (Asy'ari, 2022).

### 3. Wacana, Pengetahuan, dan Produksi “Kebenaran” Institusional

Foucault menekankan bahwa kekuasaan selalu terkait dengan produksi pengetahuan (power/knowledge), di mana apa yang dianggap sebagai “kebenaran” merupakan hasil dari relasi kuasa yang dominan (Pradana dkk., 2022). Dalam konteks penelitian ini, temuan menunjukkan bahwa wacana mengenai kekerasan seksual di kampus tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan institusional, termasuk dalam menjaga reputasi kampus.

Proses penanganan kasus melalui mekanisme formal seperti Satgas PPKS menghasilkan bentuk pengetahuan tertentu, misalnya dalam bentuk laporan, rekomendasi, dan dokumentasi kasus. Pengetahuan ini kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta membentuk persepsi publik mengenai kasus kekerasan seksual. Namun, dalam beberapa situasi, wacana institusional ini dapat membatasi ruang bagi korban untuk menyuarakan pengalaman mereka secara bebas.

Hal ini sejalan dengan pandangan Arifin dkk., (2022) yang menyatakan bahwa wacana dalam institusi pendidikan berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang mengatur apa yang dapat dikatakan dan bagaimana suatu fenomena dipahami. Dengan demikian, pembahasan mengenai kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan fakta empiris, tetapi juga dengan bagaimana fakta tersebut dikonstruksi dan direpresentasikan dalam wacana institusional.

### 4. Governmentality dan Implementasi Kebijakan PPKS

Konsep governmentality dalam pemikiran Foucault merujuk pada cara institusi mengatur perilaku individu melalui kebijakan, regulasi, dan mekanisme pengawasan (Nur & Kayano, 2020). Dalam penelitian ini, implementasi Permendikbud terkait PPKS dan pembentukan Satgas PPKS di UNDANA dapat dipahami sebagai bentuk governmentality, di mana institusi berupaya mengelola risiko kekerasan seksual melalui berbagai instrumen kebijakan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa UNDANA telah mengimplementasikan kebijakan PPKS melalui pembentukan regulasi internal, penyediaan layanan pelaporan, serta program edukasi dan sosialisasi. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam mengatur perilaku sivitas akademika serta menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini masih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti budaya diam dan stigma terhadap korban.

Hal ini menunjukkan bahwa governmentality tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan formal, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diinternalisasi dan diterima oleh individu dalam institusi. Tanpa perubahan pada level budaya dan wacana, kebijakan yang ada berpotensi tidak berjalan secara optimal (Pradana dkk., 2022).

### 5. Budaya Diam, Stigma, dan Resistensi terhadap Pelaporan

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah keberadaan budaya diam dan stigma terhadap korban yang menjadi hambatan utama dalam pelaporan kasus kekerasan seksual. Fenomena ini menunjukkan adanya resistensi sosial terhadap upaya penanganan kekerasan seksual, yang tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari struktur sosial yang lebih luas.

Budaya diam ini dapat dipahami sebagai bentuk internalisasi kekuasaan, di mana individu secara tidak sadar menyesuaikan perilaku mereka dengan norma yang berlaku, termasuk dalam hal tidak melaporkan kekerasan yang dialami (Manuel & Purba, 2023).

Stigma terhadap korban juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat posisi dominan pelaku dan melemahkan posisi korban.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Zaki (2020) yang menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual masih menjadi masalah serius di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak dapat hanya berfokus pada aspek struktural, tetapi juga harus mencakup perubahan budaya dan wacana sosial.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Nusa Cendana melalui peran Satuan Tugas PPKS dengan menggunakan perspektif relasi kuasa Michel Foucault. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa UNDANA telah memiliki kerangka kelembagaan yang relatif terstruktur dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hal ini ditunjukkan melalui pembentukan Satgas PPKS, penyusunan regulasi internal, serta implementasi program edukasi dan sosialisasi kepada sivitas akademika. Upaya pencegahan dilakukan secara sistematis melalui pendekatan regulatif, edukatif, dan kultural, sedangkan penanganan kasus dilaksanakan melalui mekanisme prosedural yang meliputi pelaporan, pemeriksaan, pemberian rekomendasi, serta pendampingan korban secara berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa, budaya diam, serta stigma terhadap korban. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban mempengaruhi keberanian korban dalam melaporkan kasus, sementara stigma sosial turut memperkuat praktik pembungkaman terhadap korban. Selain itu, dinamika kelembagaan dan keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi peran Satgas PPKS dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur relasi kuasa dan budaya sosial yang berkembang di lingkungan kampus.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan saran agar perguruan tinggi, khususnya Universitas Nusa Cendana, terus memperkuat kapasitas Satgas PPKS baik dari segi sumber daya manusia maupun dukungan kelembagaan. Selain itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam membangun budaya kampus yang inklusif, terbuka, dan berpihak pada korban melalui edukasi berkelanjutan serta penghapusan stigma sosial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan melibatkan lebih banyak institusi perguruan tinggi serta menggunakan pendekatan komparatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di berbagai konteks.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfiansyah, & Saparudin, E. (2023). Relasi Kuasa Dalam Novel Pasung Jiwa Karya Okky Madasari. *Narasi*, 1(2), 191–205. <https://doi.org/10.30762/narasi.v1i2.1818>
- Arifin, M., Efendi, E., & Nurhayati, N. S. Y. (2022). Agama Dan Sains Dalam Struktur Pembidangan Studi Islam Di Indonesia. *Al-Adabiya Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 17(1), 67–87. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v17i1.1715>
- Asy'ari, A. (2022). Relasi Kuasa Dan Tantangan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Perguruan Tinggi Islam. *Palita Journal of Social - Religion Research*, 7(2), 139–150. <https://doi.org/10.24256/pal.v7i2.3178>

- Kartono, D. T., Demartoto, A., & Hakim, F. N. (2023). Krisis Keluarga Dalam Perkembangan Otonomi Perempuan. *Sosio Konsepsia*, 12(3). <https://doi.org/10.33007/ska.v12i3.3349>
- Manuel, E. F., & Purba, T. P. (2023). Reformasi Sistem Hukum Atas Penanganan Kekerasan (Cultural Violence) Bagi Pekerja Perempuan. *Puskapsi Law Review*, 3(1), 94. <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i1.39087>
- Nur, W., & Kayano, S. (2020). Kuasa Algoritmik Dalam Masyarakat Digital (Interpretasi Pandangan Foucault Atas Teknologi). *Teknosains Media Informasi Sains Dan Teknologi*, 14(1). <https://doi.org/10.24252/teknosains.v14i1.12359>
- Pradana, M. L., Pratama, V. A., Ramdhani, R. A., & Nugrahagung, P. P. (2022). Memaknai TWK KPK Dalam Reproduksi Wacana Dengan Pemanfaatan Modal Sosial: Studi Kasus Data Percakapan TWK KPK Di Media Sosial Twitter. *Jurnal Polgov*, 4(2), 1–49. <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i2.3637>
- Pratama, R. A. (2021). Pemikiran Foucault Dan Baron: Kekuasaan Dan Pengetahuan Dalam Pendidikan Dan Bahasa. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 33–43. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.30543>
- Purwanti, T. (2020). Kuasa Tubuh Dan Perlawanan: Anti Politisasi Dan Komodifikasi Tubuh Perempuan Dalam Ruang Virtual. *Indonesian Journal of Anthropology*, 5(2), 141. <https://doi.org/10.24198/umbara.v5i2.29962>
- Saputra, M. I., Norfazilah, N., Ramadhani, A., & Marlina, A. (2024). Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Amsir Law Journal*, 5(2), 93–105. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424>
- Sari, N. K., & Syas, M. (2023). Praktik Hegemoni Media Atas Isu Boikot Produk Prancis Pada Grup Trans Media. *Jurnal Isip Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(1), 55–71. <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.8>
- Zaki, M. (2020). Fenomena Kekuasaan Politik Dan Eksistensi Gender Dalam Perkembangan Pendidikan. *Sophist Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.20414/sophist.v1i1.1>